

Konstruksi Identitas *Citizenship* pada Muslim Yogyakarta

Muhammad Johan Nasrul Huda

Prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora,

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: johannasrul@gmail.com

Abstract. *Muslim is large social identity which represent to citizenship identification in Indonesia contexts. The dynamic of Yogyakarta Muslim that have special status is interesting to investigate about how they construct citizenship identity. The research used qualitative approach in which ethnography and phenomenology as tool to understand of psychocultural reality that is main object in the research. Subjects are two elites of Muslim community in Yogyakarta. Data collection used depth interview and observation of participant to cover the problems. The result describes that Muslim construct their citizenship identity with extending of Islamic teaching categorization and elaboration in both of cultural and national. That is against to Turner's opinion which said that citizenship will be luck by religious identification. Furthermore Yogyakarta Muslim have been meaning of citizenship identity as transformative process from primordial categorization into inclusive categorization.*

Keywords: citizenship, Yogyakarta Muslim, transformation of social categorization

Abstrak. Muslim sebagai salah satu identitas sosial terbesar di Indonesia tentunya menjadi pusat perhatian terkait bagaimana mengidentifikasi identitas kewargaannya dalam konteks NKRI. Dinamika umat Muslim Yogyakarta dengan status keistimewaan menarik dikaji terkait dengan konstruksi identitas *citizenship*-nya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada etnografi dan fenomenologi sebagai alat untuk memahami realitas psikokultural yang menjadi fokus utamanya. Subyek penelitian ini berjumlah dua orang yang memiliki posisi sebagai elit dalam komunitas Muslim di Yogyakarta. Alat pengumpul data menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipan atas masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi identitas *citizenship* Muslim Yogyakarta dilakukan dengan memperluas kategorisasi agama Islam melalui elaborasi secara kultural dan nasional yang berbeda dengan pendapat Turner mengenai *citizenship* sebagai akibat dari melemahnya identifikasi terhadap agama. Sedangkan pemaknaan Muslim Yogyakarta atas identitas *citizenship* merupakan penembusan batas-batas kategorisasi sosial yang telah dilampaui oleh individu terkait proses transformasi kategorisasi yang bersifat primordial menuju kategori inklusif.

Kata kunci: Citizenship, Muslim Yogyakarta, Transformasi Kategori Sosial

Secara mengejutkan pada tahun 2013 lalu Presiden keenam Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menerima penghargaan internasional di New York atas kemampuannya menjaga kehidupan toleransi beragama di Indonesia (The Jakarta Pos, 2013). Sebagai umat Islam tentunya merasa bangga atas capaian yang telah diterima oleh pemimpin negara Indonesia tersebut. Namun sebagian pihak merasa bahwa penghargaan tersebut terlalu mengada-ada alasannya Indonesia belum benar-benar terbebas dari masalah intoleransi, kekerasan dan pertikaian yang mengatasnamakan agama (Setara Institute, 2012).

Agama sebagai salah satu pilar dari berkewargaan di Indonesia memang selalu menjadi topik pembahasan yang tidak pernah selesai. Saat pesta demokrasi yang baru saja diselenggarakan, secara nyata agama bermertamorfosa menjadi komoditas politik. Gesekan tidak hanya terjadi antar pendukung partai politik tetapi juga antar pemeluk umat beragama (Kompas, 2014). Kasus Majalah Obor Rakyat tentunya masih segar di ingatan publik bagaimana agama dipolitisir untuk menebar kebencian terhadap kategori-kategori sosial lain.

Dunia sosial yang dihadapi bukanlah sesuatu yang bersifat tunggal. Namun terbelah-belah atas etnis, agama, suku, dan atribut lainnya. Terkadang memunculkan hubungan antar kategori sosial yang tidak seimbang bahkan diskriminatif. Misalnya dalam konteks Muslim di Indonesia muncul kategorisasi sosial antara Muslim abangan, priyayi dan santri (Gertz, 1998). Sedangkan secara kuantitas lahir kelompok Islam mayoritas dan minoritas. Anggota kelompok minoritas Muslim seperti Syi'ah dan Ahmadiyah di Indonesia dalam prakteknya masih mengalami perlakuan yang intimidatif seperti pengrusakan masjid, sekolah, dan rumah bahkan harus hidup terisolir dari warga lainya (Budiman & Herawan, 2013).

Representasi polemik atas kategori agama di ruang publik pasca pilpres bukan semakin menyusut tetapi semakin menonjol. Baru-baru ini bergulir wacana dari menteri agama yang memperbolehkan pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bak jamur di musim semi, muncul berbagai respon yang menggambarkan sikap ambivalensi antara kelompok yang mendukung maupun kelompok menolak. Bagi yang mendukung beralasan bahwa agama tidak perlu dicantumkan dalam KTP untuk menghindari adanya diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas. Sebaliknya kelompok yang menolak hal itu merupakan agenda untuk mengkerdikan makna agama dalam kehidupan warga negara Indonesia. Bahkan di media sosial ada yang berpendapat sangat esktrim yang dikait-kaitkan dengan kebangkitan komunis di Indonesia.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Huda(2014)berkaitandenganrepresentasisosial

atas keindonesiaan pada Muslim Yogyakarta menemukan hal yang menarik. Dimana Muslim tradisional dan modern memiliki banyak kesamaan terhadap aspek perbandingan representasi sosial jika dibandingkan dengan Muslim transnasional. Muslim transnasional memiliki kesamaan dengan Muslim tradisional dan modern dalam merepresentasikan relasi sejarah Islam, Yogyakarta dengan keindonesiaan yaitu menggunakan representasi hegemonik. Sedangkan representasi polemik digunakan Muslim transnasional dalam menjelaskan strategi pengelolaan keindonesiaan, persepsi terhadap Indonesia saat ini dan imajinasi Indonesia ke depan.

Mengusungpenegakan syariat Islam baik yang bersifat lokal, nasional maupun melampaui batas-batas nasional membuat Muslim transnasional tidak jarang terlibat konflik dan pertikaan. Muslim transnasional cenderung merepresentasikan kelompoknya secara internal dan subyektif tanpa memperhatikan suasana obyektif dari suasana keindonesiaan. Sedangkan Muslim tradisional dan modern lebih merepresentasikan kelompoknya secara dialogis-kompromis dengan menekankan pada pengembangan solusi alternatif dalam konteks keindonesiaan.

Pemaknaan Muslim tradisional dan Muslim modern atas keindonesiaan merepresentasikan optimisme dan positif dimana bahwa Indonesia sebagai negara yang terbuka terhadap perkembangan bangsa lain dan harus mampu berdaulat dalam segala aspek kehidupan. Lain halnya dengan Muslim transnasional yang dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia memiliki makna jika diterapkan syariat Islam secara menyeluruh.

Era keterbukaan publik saat ini merupakan ekses dari demokrasi yang berjalan nampaknya belum mampu meredakan ketegangan yang bersifat primordial dalam tatanan kehidupan bernegara. Dampaknya Muslim di Indonesia masih terus bergelut mencari identitas baik secara individu maupun kelompok terkait relasinya dengan negara. Turner (1989) menegaskan individu dalam lingkup sosial tidak dapat dilepaskan dari kungkungan kategorisasi yang dibentuknya bersama dengan orang lain. Dinamika kategorisasi sosial tersebut dapat bersifat superordinat, mesoordinat dan subordinat (Turner, 1989).

Berakar pada pendekatan psikologi kognitif efek kategorisasi social tersebut memunculkan segregasi atas dunia sosial yang dialami oleh individu (Brown, 2005). Dengan begitu perilaku sosial yang terjadi juga akan dipengaruhi oleh model kategorisasi yang dimiliki setiap individu. Semakin rapat batas-batas kategorisasi tersebut akan semakin sedikit peluang terjadinya kontak sosial dan hal ini cenderung akan menjadi katalisator bagi munculnya konflik sosial (Hogg, 2004).

Dinamika relasi Muslim dan negara mungkin dapat mengawali munculnya oposisi binar yang saling bertolak belakang dan saling berhadap-hadapan. Muslim mempersepsikan Islam sebagai kategori yang bersifat superordinat dan negara sebagai kategori yang bersifat ordinat atau di bawah agama. Sebagaimana pernah ditulis oleh Felix Siaw, seorang mualaf keturunan China yang berprofesi sebagai motivator di akun *Twitter*-nya "*bahwa membela nasionalisme tidak jelas tujuannya, sedangkan membela Islam pasti*

sudah jelas tujuannya."

Sebagian pemahaman di atas tidak dapat dilepaskan dari problem mendasar hubungan antara kategori agama dan nasional atas keindonesiaan yang masih terus berproses mencari sebuah definisi yang tepat (Haris, 2014). Sehingga di lapangan ditemukan distansi antara kesadaran beragama dan kesadaran berwarganegara yang sangat lebar. Satu sisi menjadi Muslim merupakan proses yang terus berlangsung sepanjang hidup individu, begitu juga karakter kewargaan juga masih terus berproses di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Muslim sebagai salah satu identitas sosial terbesar di Indonesia tentunya menjadi pusat perhatian terkait bagaimana mengidentifikasi identitas kewargaannya dalam konteks NKRI. Dinamika umat Muslim mayoritas dan minoritas dalam mengaktualisasikan identitas *citizenship*-nya menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa relasi antar identitas merupakan bagian terpenting dalam memahami orientasi dan fungsi identitas sosial dalam menciptakan kesetaraan dan keharmonisan bersama.

Pada penelitian ini mengangkat masalah bagaimana konstruksi identitas *citizenship* pada Muslim di Yogyakarta. Penelitian ini juga mempertanyakan bagaimana pemaknaan *citizenship* pada Muslim di Yogyakarta. Penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk mengetahui konstruksi identitas *citizenship* pada Muslim di Yogyakarta dan bagaimana pemaknaan identitas *citizenship* pada Muslim di Yogyakarta.

Kajian tentang *citizenship* pertama kali dilakukan oleh Marshall, T.H (1950) dengan tema *Citizenship and Social Class and Other Essay*. Marshall secara formal melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap solidaritas sosial dari Durkheim sebagai fondasi dalam menyusun konsep *citizenship*. Marshall mengembangkan teori tentang masyarakat pasca perang dengan menggunakan analisis yang menghubungkan antara relasi kelas-kelas sosial, kesejahteraan dan *citizenship* (Blumer & Reiss, 1996). Sehingga nuansa konsepsi *citizenship*-nya lebih kental dengan filsafat politik sebagai latar akademik Marshall

Turner tersebut memberikan kritik dan perluasan dari teori *citizenship* yang dikemukakan Marshall. Turner menggunakan pendekatan sosiologis untuk menjelaskan *citizenship* yang fokus pada institusi *citizenship*, identitas sosial, sifat alami ketidakadilan dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi (Turner, 1997).

Kajian lainnya yang bersifat teoritis terhadap *citizenship*, terdapat penelitian yang bersifat lapangan yang dilakukan oleh Stephen Latham (2008) dengan tema "*Muslim In Switzerland: Is Citizenship Really Incompatible with Muslim Identity?*" Dalam penelitiannya Latham menemukan bahwa pemuda Muslim yang tinggal di Switzerland memperlihatkan adanya upaya untuk melakukan pembentukan identitas yang bersifat superordinat daripada membuat kebekuan terhadap ikatan primordialnya. Meski demikian Muslim Swiss tetap merupakan sebuah identitas yang kompleks dan perlu bagi individu terus berusaha untuk mengelola sumber-sumber yang sangat beragam.

JMF Jaspars dan Suwarsih Warnaen (1979) menjelaskan bahwa masing-masing kelompok etnis di Indonesia cenderung menilai baik terhadap kelompoknya dan buruk kepada yang lainnya. Namun cukup berbeda jika mereka hidup di daerah yang heterogen. Yang terjadi akan menyebabkan berkurangnya stereotipe negatif antara kelompok, dan kemudian norma kelompok baru akan muncul untuk menjembatani perbedaan di antara mereka. Dalam konteks Indonesia-an ini sangat penting untuk mencapai identitas nasional seperti apa yang dinyatakan dalam slogan "Bhinneka Tunggal Ika".

Florian Pohl Drift (2007) menggambarkan identitas Islam melalui pendidikan sebagai agen dalam menciptakan keharmonisan dan perdamaian di Indonesia. Pohl menggambarkan sekolah Islam di Indonesia merupakan bagian dari pertukaran dan negosiasi antara kepentingan negara dan agama sejak sekolah mereka memperkenalkan unsur-unsur dimasukkannya keterbukaan untuk keanekaragaman. Hal ini telah menopang kehidupan rukun dan damai pada keragaman budaya dan agama di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Pohl menekankan perkembangan sosiologis pendidikan Islam mulai dari kemerdekaan sampai fase awal milenium baru (2000-an) saat Indonesia menghadapi wacana pluralisme dan inklusivitas di ruang publik.

Huda (2012) menunjukkan bahwa masyarakat Yogyakarta memahami keistimewaan wilayahnya meliputi aspek sejarah, politik, budaya dan pengelolaan administrasi pemerintahan. Masyarakat Yogyakarta menilai identitas sosialnya sangat positif dibandingkan dengan identitas sosial

lainnya. Sehingga ketika berhadapan dengan identitas nasional masyarakat Yogyakarta memilih strategi kompetisi sosial yang diekspresikan melalui demonstrasi jalanan maupun parlementer. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan status keistimewaan Yogyakarta.

Penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dari studi-studi terdahulu. Pertama, pada fokus permasalahan ingin menelaah lebih dalam bentuk-bentuk identitas *citizenship* serta bagaimana masyarakat Muslim lokal yang menguat identitas sosialnya tersebut memaknai *citizenship*-nya dalam bingkai lokal maupun nasional. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dan fenomenologi yang akan melihat langsung ke lapangan hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat Muslim Yogyakarta. Etnografi digunakan untuk mengetahui bagaimana proses konstruksi identitas *citizenship* Muslim Yogyakarta terhadap Identitas agamanya. Sedangkan fenomenologi digunakan untuk memahami bagaimana Muslim Yogyakarta memaknai identitas *citizenship*-nya baik lokal maupun nasional. Dari beberapa perbedaan yang telah disebutkan, kiranya penelitian ini memiliki orisinalitas dan tingkat kebaruan isu terkait dengan masalah multikulturalisme dan nasionalisme dalam bingkai keindonesiaan.

Konstruksi Identitas dalam Perspektif Teori Kategorisasi Diri

Teori kategorisasi diri oleh Turner dan muridnya (Shaw, 2003) dielaborasi untuk memahami identifikasi individu terhadap kelompok dengan hipotesisnya menjelaskan bahwa individu berfikir secara relasional,

dimana konsep diri individu yang termasuk dalam identitas sosial bukan sesuatu yang permanen tetapi dibentuk lagi dalam setiap situasi baru berdasarkan pada kesesuaian dari apa yang menjadi bagian dari diri dan situasi baru.

Menurut Farr (Hogg, dkk, 2004) kategorisasi diri merupakan komponen kognitif dari perluasan perspektif identitas sosial untuk mengetahui bagaimana kategorisasi diri terjadi dan orang lain membentuk identifikasi sosial dengan menghubungkan ciri-ciri kelompok dan fenomena kelompok. Senada dengan pendapat di atas Oakes (Oldmeadow, dkk, 2005) memberi definisi kategorisasi diri adalah sebagai proses kognitif yang berkaitan dengan pengumpulan individu, termasuk diri sebagai satu unit yang terjadi pada level kelompok. Berdasarkan kedua pendapat tersebut pada intinya kategorisasi diri mengarah pada penggunaan psikologi kognitif untuk menjelaskan proses yang terjadi dalam hubungan antar kelompok seperti pembentukan identitas sosial.

Melalui kategorisasi diri akan mengakibatkan seseorang merasa memiliki kesamaan dengan anggota pada kelompok didalam dan cenderung melihat berbeda terhadap anggota kelompok diluar. Kategorisasi diri meliputi sikap, kepercayaan, nilai, perasaan, norma, gaya bicara dan properties lain yang dipercaya berhubungan dengan relevansi kategorisasi antar kelompok (Stets, dkk, 2005).

Menurut Turner (Padilla, Amado M. Perez, William, 2003) secara garis besar kategorisasi diri dalam konteks sosial merupakan kategorisasi sosial yang melihat unsur kognitif sebagai dimensi terpenting

dari proses identitas sosial. Kognitif orang mewakili kelompok dalam bentuk *prototype* yang berhubungan dengan atribut yang sama dari anggota kelompok dan struktur hubungan dalam kelompok serta model perbedaan yang terjadi pada kelompok. *Prototype* adalah kognitif sosial yang dibentuk sesuai dengan prinsip meminimalisasi ratio antara perbedaan dalam kelompok dan antar kelompok dengan menekankan pada perbedaan dan pembentukan kategori yang menyukai pada atribut kelompok sendiri (Hogg, Michael. Abrams, Dominic. Otten, Sabine. Hinkle, Steve, 2004). *Prototype* secara luas bergerak dari satu situasi ke situasi lain sebagai fungsi dari kerangka perbandingan sosial anggota kelompok di dalam dan kelompok diluar.

Proses kategorisasi mengarahkan individu untuk melihat lebih terhadap individu lain sebagai individu yang unik melalui lensa *prototype* sampai menyebabkan terjadinya depersonalisasi, dimana secara umum depersonalisasi dipahami terlibat dalam meningkatkan identitas sosial (Mullen Brian. Migdal Michael J. Rozell Drew, 2003). *Prototype* berdasarkan persepsi terhadap anggota kelompok diluar disebut *stereotyping*: “*kamu melihat mereka sebagai sesuatu yang sama dengan yang lain serta memiliki atribut dari kelompok di luar*”. Kategorisasi terhadap diri sendiri berarti melakukan proses depersonalisasi pada diri sendiri. Kategorisasi pada diri sendiri menghasilkan perilaku normatif dalam kelompok, komformitas dan pola hubungan kelompok sendiri, kepercayaan, dan solidaritas (Hogg, Michael. Abrams, Dominic. Otten, Sabine. Hinkle, Steve. 2004)

Kategorisasi juga sebagai unsur kognitif mempunyai beberapa pengaruh yang penting dan bernilai dalam pembentukan persepsi dan konsep diri dalam situasi tertentu. Sebagai contoh gender, dan ras selalu terkait dengan situasi kategorisasi sosial. Orang menggunakan akses kategorisasi untuk memahami konteks sosial dalam ruang lingkup perilaku nyata. Dalam penyelidikan secara mendalam kategorisasi mengidentifikasi hal-hal yang sama dan berbeda diantara orang yang disebut dengan struktur atau perbandingan, selain itu kategorisasi yang bertanya mengenai alasan tingkah laku seseorang disebut sebagai normatif (Hogg, Michael. Abrams, Dominic. Otten, Sabine. Hinkle, Steve. 2004)

Kategori-kategori sosial sangat bermanfaat untuk menyederhanakan dan membuat sesuatu menjadi teratur, hal ini semata-mata disebabkan karena dunia merupakan tempat yang terlalu kompleks sehingga kita tidak akan berhasil menghadapinya tanpa keberadaan cara-cara untuk menyederhanakan dan mengaturnya (Brown, Rupert. 2005). Campbell (Brown, Rupert. 2005) mengidentifikasi keberadaan sesuatu yang tampak menyebabkan entitas diskrit tertentu (yaitu: orang) dipandang sebagai kelompok, yaitu sebuah *property* yang disebutnya *entitativity*. Entitativitas itu meliputi nasib serupa (*common fate*), kesamaan dan kedekatan (proksimitas). Orang yang melakukan sesuatu bersama-sama atau kejadian serupa (*common fate*) dapat disebut membentuk kategorisasi. Turner dan kawan-kawan berpendapat bahwa apapun yang terjadi dan dalam situasi apapun secara umum, tingkat dasar untuk mengkategorisasikan orang adalah berdasarkan kelompok sosialnya (*social group*). Dimana tingkat superordinat dan subordinatnya

adalah manusia (*human being*) dan perbedaan individual (*individual differences*).

***Citizenship* Sebagai Model Identitas Bersama**

Marshal (1950) mendefinisikan *citizenship* sebagai suatu kumpulan hak dan kewajiban yang memberi individu identitas legal formal. Sedang menurut Turner (1997) *Citizenship* dipahami sebagai seperangkat kewajiban dan hak yang diberikan kepada individu sebagai anggota dari komunitas politik. Komunitas politik ini bukan semata-mata partai politik yang memiliki ideologi tertentu. Namun lebih mengacu pada adanya jaminan hak dan kewajiban kepada individu secara seimbang. Sehingga konstruksi *citizenship* lebih bersifat dinamis bukan statis karena orientasinya lebih luas meliputi lokal, nasional bahkan global.

Ilmuwan politik berpendapat *citizenship* tidak hanya pemikiran mengenai pencarian akses atas keterbatasan ekonomi dan dominasi politik, tetapi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas dalam masyarakat sipil dan budaya (Turner, 1998). Dimensi budaya dari *citizenship* sekarang merupakan komponen esensial dari studi-studi *citizenship*. Khususnya dalam konteks dimana ada ambiguitas politik seputar analisis terhadap fragmentasi budaya dan postmodernisme. Sebab tujuan utama dari adanya *citizenship* adalah untuk mencapai *civic virtue* atau kebaikan dalam sipil sebagai fungsi dari demokrasi.

Identitas-identitas *citizenship* dan budaya-budaya *citizenship* ternyata merupakan identitas-identitas nasional dan budaya-budaya nasional. Hal ini dikaitkan dengan pendapat Anderson (1983) yang mendefinisikan bangsa sebagai komunitas terbayang dan bangsa yang

merupakan ciptaan (James, 1996). Maka sebuah komunal berbasis *citizenship* secara konsisten akan diperbahurui dalam ingatan kolektif melalui perayaan tentang nostalgia, peringatan perjuangan nasional secara umum dan pengalaman kolektif yang terus digelorakan.

Berakar dari perkembangan masyarakat yang menuju era modern, *citizenship* dapat dilihat sebagai bentuk solidaritas sosial. Dan menjawab pertanyaan *bagaimana masyarakat yang penuh dengan perbedaan eksis diantara kelompok-kelompok sosial yang berbeda dan komunitas yang berbeda dalam sebuah negara-bangsa?* Alasannya dengan menurunnya pengaruh agama resmi, *citizenship* memberikan pada kita sebuah nasional dan budaya bersama, seperangkat identitas bersama, dan sistem nilai bersama (Turner, 1997). Pada akhirnya *citizenship* merupakan model identitas bersama yang menjadi dasar fundamental bagi masyarakat dalam lingkungan multikultural.

Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa, sebagaimana pendapat Bruner (1972) terdapat ada sekitar 300 etnis hidup di Indonesia dan berbicara dengan 250 bahasa yang berbeda. Penting dimunculkan kesadaran kewargaan atau *citizenship* yang mengaksentuasikan hak dan kewajiban dalam konteks negara bukan hanya pada tataran sentimen primordial. Sehingga identitas nasional sedapat mungkin akan diletakkan lebih tinggi daripada identitas sosial lainnya.

Berdasarkan perkembangan kategorisasi sosial yang dikemukakan oleh Turner (1989) *citizenship* harus dikembangkan menjadi kategori yang bersifat superordinat. Dimana kategori superordinat berfungsi sebagai payung

yang menaungi semua kategori sosial yang ada di dalamnya. Lebih jauh pikiran, perasaan dan perilaku dalam kategori-kategori yang berbeda bukan disatukan atau dilumpuhkan namun ditransformasi untuk tujuan yang lebih luas.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Suharsimi Arikunto (1998:245), pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak memerlukan hipotesis tetapi menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.

Sumber data penelitian ini akan dipahami melalui pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan yang menggambarkan arti dari pengalaman hidup (*lived experience*) dari beberapa individu mengenai suatu konsep atau *phenomenon* (Creswell, 1998). Menurut Moustakas (1994) terdapat beberapa proses inti dalam penelitian fenomenologi yaitu, *epoche*, *reduction*, *imaginative variation* dan *synthesis of meanings and essence*. Penggunaan pendekatan fenomenologi selain bertujuan untuk menangkap makna terdalam dari identitas *citizenship* Muslim Yogyakarta juga untuk mencari asas-asas budaya, sejarah dan politik yang mewarnai pembentukan makna itu sendiri.

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti (Azwar, 2003). Untuk memperoleh gambaran dan informasi yang jelas tentang dinamika konstruksi identitas *citizenship* Muslim

yogyakarta peneliti menentukan subjek penelitian dengan memilih subyek yang dianggap representatif dapat mengungkap aspek-aspek dari pertanyaan penelitian.

Adapun subyek penelitian ini terdiri dari para tokoh Muslim yang aktif dalam organisasi formal maupun informal. *Kedua*, adalah informan yang terdiri dari masyarakat Muslim yang secara geneologis berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Untuk penentuan informan penelitian ini digunakan teknik snowball (Singaribun, 2010) dengan asumsi bahwa data yang diperoleh akan selalu berkembang dan kompleks berdasarkan variasi dari jumlah subyek dan informan penelitian. Guna mengantisipasi keterbatasan peneliti dalam pengumpulan data maka, peneliti akan melibatkan sejumlah mahasiswa yang cakap dalam teknik interview dan observasi untuk membantu pengumpulan data-data penelitian yang dibutuhkan.

Guna memperoleh data yang representatif baik data primer maupun data sekunder dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 1999) menggunakan metode observasi partisipan, dokumentasi dan wawancara mendalam. Ketiga metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh fakta-fakta psikologis dari individu maupun kelompok yang tengah berhadapan dengan tekanan politik dan arus demokrasi dalam mencapai identitas sosial positif keistimewaan Yogyakarta.

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merepresentasikan kondisi keislaman yang khas di tingkat lokal. Dengan kancan

lapangan difokuskan pada lokasi di sekitar pusat Keraton Kasultanan Yogyakarta. Untuk menganalisa data penelitian digunakan teknik analisa *data coding* (Strauss dan Corbin 1990), dengan tahapan sebagai berikut: 1) *Open coding*: merupakan proses untuk mengurai, menelaah, mengartikan membandingkan, mengkategorisasikan data penelitian melalui proses penelaahan yang teliti yang dilakukan secara teliti dan mendetail. 2) *Axial coding*: merupakan prosedur yang diarahkan untuk melihat keterkaitan antara kategori-kategori yang dihasilkan melalui *open coding*, dimana spesifikasi dan pemetaanya didasarkan pada ciri hubungan kontekstual, lakuan, ciri interaksional dan implikasi. 3) *Selective coding*: kegiatan memilih dan mensistematisasikan data dan gambaran konsepsinya guna menyusun *story line* atau suatu tatanan proposisi yang membentuk untaian pernyataan tertentu secara sistematis.

Model analisa data seperti ini sangat sesuai dengan orientasi penelitian yang menginginkan munculnya kedalaman dari fakta-fakta psikologi yang membangun sebuah konstruksi pikiran, perasaan dan perilaku atas identitas *citizenship* di Yogyakarta.

Hasil

Konstruksi Identitas *Citizenship* Muslim Yogyakarta

Konstruksi identitas *citizenship* Muslim Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari dinamika antar identitas sosial yang dimiliki oleh individu baik yang bersifat primordial maupun instrumental. Identitas primordial terkait dengan afiliasi individu dengan etnisitas, budaya dan agama sedangkan identitas yang bersifat instrumental terkait dengan kebangsaan.

Identitas *citizenship* Muslim Yogyakarta berkaitan dengan karakter komunal yang sudah menjadi kultur dari masyarakat Indonesia pada umumnya yang menekankan pada kebersamaan. Ikatan kebersamaan ini sangat kuat sebagai kosekuensi dari model budaya komunal, sebagaimana wawancara berikut:

Orang di Indonesia itu hidup berkomunal tidak hanya soal agama soal golongan agama ada, karena kultur masyarakat kita itu kultur yang bersifat paguyuban, komunalistik hidup bersama-sama, kebersamaanya itu sangat kuat (WII, 24-26).

Identitas keislaman tidak akan mengalami benturan dengan identitas lain jika dapat berhubungan dengan multikulturalisme, multisains dan multi apapun yang bersifat mengglobal sebagaimana wawancara berikut ini:

Saya lebih percaya Islam yang sudah bersentuhan dengan secara terbuka dengan multikultur, multisains, multi segala-galanya itu kalau bisa merespon islam akan lebih kaya (WIII, 12-15)

Ajaran Islam membedakan relasi seiman dan beda iman dalam kaitanya dengan tindakan sosial. Sesama Muslim dianggap sebagai saudara sedangkan di luar Islam dianggap sebagai tetangga. Meskipun demikian tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap non Islam yang berada dalam satu perkampungan, karena mereka memiliki hak tetangga yang wajib diberi perlakuan yang sama saat membutuhkan bantuan, sebagaimana wawancara berikut ini:

dalam Islam itu ada hak saudara seagama, ada hak tetangga ya..jadi misalnya kalau

di sini ada donor darah prioritas pada sesama Muslim, kalau dari luar yang non Muslim minta darah tidak kita layani, tetapi kalau warga Jogokariyan meskipun non Muslim kita akan layani karena dia punya hak tetangga. Di sini warga non-Muslim minta bantun beasiswa anaknya untuk modal usaha akan kita layani karena mereka punya hak tetangga, tapi dari yang luar kampung dia tidak punya hak. Tetapi kalau Muslim dari luar kita bantu karena dia punya sesama Muslim (WI, 111-116)

Kategorisasi agama dalam kehidupan Muslim Yogyakarta tidak hanya bersifat mono dimensional dengan hanya menekankan aspek ritus semata. Namun agama juga dapat digunakan sebagai media sosial yang dapat mempertemukan pemeluk agama yang berbeda-beda. Secara tegas disebutkan bahwa selain aspek vertikal agama juga memiliki etika dan kemanusiaan yang memungkinkan munculnya visi yang sama dalam kehidupan umat beragama, sebagaimana wawancara berikut ini:

Pengalaman saya agama itu memiliki dua aspek yaitu horizontal dan vertikal, lha..yang hamblun minallah itu isinya dua; teologi dan ritus itu non kooperatif non segala-galanya itu hak yang sangat privat. Tapi yang hablun minannas itu kan etika dan kemanusiaan semua agama ketemu di situ (W II, 56-59)

Ekpresi kehidupan Muslim Yogyakarta sebagai warganegara dibuktikan dengan penerimaan warga non-Muslim di lingkungan Masjid Jogokaryan, memberi kebebasan menjalankan peribadatan yang berbeda serta membuka akses pelayanan kesehatan bagi

yang membutuhkan, sebagaimana wawancara berikut ini:

di sebelah Masjid Jogokariyan ini rumah tokoh agama nasrani yang sering digunakan sembahyang, pemiliknya namanya Ignatius tidak ada persoalan, biasa di klinik masjid ini orang pakai salib beorbat di sini ini biasa, waktu gempa itu warga-warga Khatolik, Kristen yang sakit di rawat di masjid tidak ada persoalan (W III, 90-93)

Muslim Yogyakarta menafsirkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara justru sangat sesuai dengan semangat keislaman. Ketuhanan Yang Maha Esa meskipun berasal dari agama Islam tetapi dapat diterima oleh semua kelompok agama. Hal ini disebabkan adanya kesadaran Islam sebagai mayoritas dan adanya kesadaran menjaga kebersamaan serta harmonisasi itu lebih penting dari pada mengedepankan identitas masing-masing kelompok sebagaimana wawancara berikut:

Ketuhanan YME itu milik Islam tetapi disadari diakui bahwa yang mayoritas Islam tidak menjadi masalah. Adanya kesadaran dalam menjaga kebersamaan itu, harmonisasi itu lebih penting daripada ciri-ciri individu dan kelompok yang lebih ditonjolkan, meskipun ke dalam memaknai secara berbeda, tetapi dalam kebersamaan ya dimaknai secara bersama (W I, 67-70)

Pandangan yang lebih egalitar terhadap Pancasila sebagai simbol dari penerimaan terhadap ideologi yang tidak sepenuhnya berbasis nasionalisme tetapi juga agama dalam pengelolaan negara. Hal ini dianggap bahwa

hubungan antara nasionalisme dan agama telah berjalan sesuai dengan cita-cita pendirian dari negara Indonesia, sebagaimana wawancara berikut ini:

Pancasila itu bukan nasionalisme bukan juga agama. mengenai hubungan antara negara dan agama bung Hatta pernah mengatakan dengan tegas” Kita tidak hendak mendirikan negara nasional modern yang memisahkan antara agama dan negara, karena boleh jadi hukum-hukum agama akan menjadi hukum negara melalui objektivikasi di parlemen, maka ianya tidak lagi disebut hukum agama, tetapi hukum negara (W II, 222-226)

Secara lebih jauh relasi antara identitas agama dan negara disebutkan bahwa kehidupan negara merupakan bagian dari kehidupan agama sejak jaman dahulu jaman nabi pun juga begitu, nabipun juga pernah membela dalam perang Hizbul Fudzul, membela suku Qurais, bukan agama saat dia belum diangkat jadi *rasul*, dan juga dalam piagam madinah siapapun orang madinah Yahudi, Nasrani atau Islam wajib membela negara madinah dimana mereka hidup dan tinggal, sebagaimana wawancara berikut ini:

karena negara itu bagian dalam kehidupan agama, sejak jaman dahulu jaman nabipun juga begitu, nabipun juga pernah membela dalam perang Hizbul Fudzul, membela suku Qurais, bukan agama saat dia belum diangkat jadi rosul, dan juga dalam piagam madinah siapapun orang madinah Yahudi, Nasrani atau Islam wajib membela

negara madinah dimana mereka hidup dan tinggal (W III, 80-86)

Identitas agama yang bersifat substantif dalam diri seseorang akan dapat menjadi pijakan dalam mengelola perbedaan-perbedaan seperti dalam konteks multikulturalisme dan persoalan pluralisme. Salah satunya adalah dimensi dari ajaran tasawuf memiliki kontribusi dalam penerimaan terhadap isu-isu kebhinekaan, sebagaimana wawancara berikut ini:

Saya menemukan isu HAM, multikultural, isu gender, itu tidak ada dari referensi barat, justru isu mondial yang sedemikian liberal itu justru saya dapat menemukan dasar pijakan itu, tanpa kehilangan identitas santrinya itu justru di tasawuf, saya sudah ngajar tasawuf selama 20 tahun (W I, 45-48)

Konstruksi identitas *citizenship* Muslim Yogyakarta dibentuk melalui proses kategorisasi diri dan identifikasi terhadap ajaran agama Islam yang terjadi secara terus menerus. Di samping itu konstruksi identitas *citizenship* Muslim Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari akulturasi budaya masyarakat Yogyakarta yang syarat dengan nilai-nilai spiritual dan sosial. Tampak sekali bahwa kesadaran atas identitas *citizenship* mampu membentuk sebuah pola pikir, sikap dan perilaku yang saling menghargai antar sesama warga negara. Sehingga semua warga yang ada di dalamnya merasa memiliki persamaan hak dan kewajiban dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia.

Makna Identitas *Citizenship* Muslim Yogyakarta

Muslim Yogyakarta mengkategorisasikan dirinya sebagai orang Jawa, orang Indonesia dan

orang Islam secara total. Relasi diantara ketiga kategorisasi sosial tersebut berjalan secara seimbang tanpa ada yang tereduksi oleh yang lainnya sebagaimana wawancara di bawah ini:

Kalau saya di sini saya orang Jawa 100% orang Jawa, saya orang Indonesia 100% orang Indonesia, dan saya orang Islam 100% orang Islam maka di sini (Masjid Jogokaryan) logo itu tulisan Jawa, tulisan Indonesia dan tulisan Arab (W II, 75-78)

Dalam konteks Yogyakarta relasi kewargaan dikelola melalui konsep *manunggaling kawulo gusti* yang menjadi komitmen dan harus dijunjung tinggi dalam sebuah tatanan bersama. Konsep ini merupakan cara untuk membangun hubungan dengan yang lain, sebagaimana wawancara berikut ini:

Penataanya didasarkan atas manunggaling kawulo lan gusti, yang mana kesepakatan antara kawulo lan gusti ini menjadi komitmen yang harus dijunjung tinggi (W III, 102-105)

Identitas Islam yang menjadi bagian dalam konstruksi identitas *citizenship* dipersepsikan memiliki keluasaan ruang gerak. Dimana dalam banyak hal Islam dapat berelasi dengan budaya dari agama manapun dalam mengeskpresikan hubungan yang sifat vertikal praktik ibadah dalam maupun horizontal, sebagaimana wawancara berikut:

Islam itu ada ruang yang buka seluas-luasnya, orang islam bisa pakai sarung itu bagian dari budaya Hindu, bisa pakai jas dan celana panjang yang itu budaya Kristen, ya..mau bisa pakai jubah yang itu model India tidak ada persoalan mengenai Islam itu sendiri (W II, 40-44)

Identitas *citizenship* Muslim Yogyakarta tidak hanya sekedar berkaitan dengan homogenitas tetapi juga hubungan yang bersifat heterogenitas. Bahkan masuk ke dalam wilayah privat identitas keagamaan yang biasanya dihindari karena batas-batas kategorisasi terlalu kuat. Anehnya batas-batas kategorisasi dalam agama dapat dilewati tanpa kehilangan identitas masing-masing, sebagaimana wawancara berikut:

Saya ini biasa ceramah di perayaan natal ini, yang kemarin tema besarnya "berjumpa dengan Allah dalam Keluarga" ini di dalam Al Quran tidak pernah ada kata menemukan tuhan tetapi menjumpai ayatnnya wa man kana yarju liqoa rabbihi fal yakmal aamila sholihin...barang siapa yang ingin berjumpa Tuhannya maka berbuat baiklah (W I, 35-38)

Batas-batas kategorisasi sosial yang dilampau oleh Muslim Yogyakarta menunjukkan bahwa adanya proses transformasi kategorisasi yang bersifat primordial – instrumental menuju kategori yang bersifat substantial. Kategori ini diyakini lebih bersifat superior dan lebih bisa diterima keberadaanya karena sifatnya yang tidak memihak kepada salah satu kategori tetapi melindungi semuanya dalam bingkai yang lebih luas.

Diskusi

Konstruksi identitas *citizenship* Muslim Yogyakarta dilakukan dengan memperluas kategorisasi agama Islam melalui elaborasi secara kultural dan nasional. Muslim Yogyakarta justru menggunakan ikatan agama bukan sebaliknya melepaskan diri darinya untuk memperoleh identitas *citizenship*-nya. Hal ini

bertolak belakang dengan konsep *citizenship* dari Turner (1997) yang mengatakan bahwa menurunnya pengaruh agama resmi, *citizenship* memberikan pada kita sebuah nasional dan budaya bersama, seperangkat identitas bersama, dan sistem nilai bersama.

Pengaruh identitas agama yang bersifat mengakar dalam kehidupan Muslim Yogyakarta justru memberi landasan bagaimana konstruksi identitas *citizenship* dilakukan. Tidak dipungkiri bahwa faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah masih kuatnya identitas agama dalam konstruksi identitas *citizenship* karena agama berkaitan erat dengan kultur Jawa yang sudah mengakar dalam dimensi kognitif masyarakat Yogyakarta. Secara tegas tercermin dalam pemakaian Muslim Yogyakarta terhadap identitas *citizenship*-nya

“Kalau saya di sini saya orang Jawa 100% orang Jawa, saya orang Indonesia 100% orang Indonesia, dan saya orang Islam 100% orang Islam maka di sini (Masjid Jogokaryan) logo itu tulisan Jawa, tulisan Indonesia dan tulisan Arab”.

Konstruksi identitas *citizenship* Muslim Yogyakarta juga berjalan linier dengan kategorisasi dan identifikasi terhadap akulturasi keagamaan dan budaya yang dimiliki. Agama dan budaya dipandang lebih dahulu menjadi identitas sosial Muslim Yogyakarta, sedangkan identitas *citizenship* muncul sebagai payung dari keberadaan identitas agama dan budaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Turner dan kawan-kawan (1989) bahwa apapun yang terjadi dan dalam situasi apapun secara umum, tingkat dasar untuk mengakategorisasikan

orang adalah berdasarkan kelompok sosialnya (*social group*).

Identitas budaya dan identitas agama dapat saling bertemu dan mempengaruhi satu dengan lainnya justru memperkuat identifikasi sosial terhadap agama yang sudah mengalami proses indigenisasi dalam kultur Jawa. Muslim Yogyakarta sudah tidak lagi merisaukan atau gelisah dengan struktur formal ke Indonesia yang oleh sementara kelompok dianggap tidak mengakomodasi kepentingan Islam. Bahkan Pancasila dianggap sudah merepresentasi identitas *citizenship* yang ideal dalam mengatasi berbagai macam perbedaan yang ada dalam konteks keindonesiaan. Menurut Muslim Yogyakarta “*Pancasila itu bukan nasionalisme bukan juga agama*”. Meskipun demikian di dalam Pancasila terdapat simbol keunitasan sebagai dasar pijakan dalam rangka mengakomodasi perbedaan keyakinan antar umat beragama. Simbol keunitasan tersebut justru terletak dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pergaulan yang dinamis dalam konteks keindonesiaan tidak membuat Muslim Yogyakarta mengalami konflik atau ketegangan dengan identitas budaya, agama dan etnis lainnya. Justru Muslim Yogyakarta memaknai secara positif terhadap identitas *citizenship*-nya sebagai komponen dari identitas yang bersifat superordinat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini Muslim Yogyakarta melakukan rekategorisasi terhadap identitas agama maupun identitas budaya menjadi identitas yang bersifat lebih luas yang mengatasi sentimen primordial untuk menuju suatu kehidupan bangsa yang harmoni.

Kesimpulan

Konstruksi identitas *citizenship* Muslim Yogyakarta dilakukan dengan memperluas kategorisasi agama Islam melalui elaborasi secara kultural dan nasional. Muslim Yogyakarta justru menggunakan ikatan agama bukan sebaliknya melepaskan diri darinya untuk memperoleh identitas *citizenship*-nya. Hal ini bertolak belakang dengan konsep *citizenship* pada umumnya yang mengatakan bahwa menurunnya pengaruh agama resmi, *citizenship* memberikan pada kita sebuah nasional dan budaya bersama, seperangkat identitas bersama, dan sistem nilai bersama.

Pergaulan yang dinamis dalam konteks keindonesiaan tidak membuat Muslim Yogyakarta mengalami konflik atau ketegangan dengan identitas budaya, agama dan etnis lainnya. Justru Muslim Yogyakarta memaknai secara positif terhadap identitas *citizenship*-nya sebagai komponen dari identitas yang bersifat superordinat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini Muslim Yogyakarta melakukan rekategorisasi terhadap identitas agama maupun identitas budaya menjadi identitas yang bersifat lebih luas yang mengatasi sentimen primordial untuk menuju suatu kehidupan bangsa yang harmoni.

Kepustakaan

- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design: choosing among five traditions*. California. Sage Publications
- Emily, S. (2003). *The role of social identity in resistance to international criminal law: the case of Serbia and the ICTY*. Berkeley Program in Soviet and Post-Soviet Studies University of California, Berkeley.
- Haslam, A. S. (2001). *Psychology in organization (the social identity approach)*. New Delhi. Sage Publication.
- Hogg, M., Abrams, D., Otten, S., Hinkle, S. (2004). The social identity perspective intergroup relations, self-conception, and small groups. *Small Group Research*, Vol. 35, No. 3, pp. 246-2 Sage Publication.
- Jaspars, J.M.F. & Warnaen, S. (1979). *Intergroup relations, ethnic identity and self-evaluation in Indonesia*. Henry Tajfel (eds). Social Identity and Intergroup relation. Cambridge University Press. London.
- Julian, O., Foddy, M. Platow, M, J. (2005). *Task-groups as self-categories: a social identity perspective on status generalization*. <http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.html>
- Kelman, H.C. and Hamilton, V. L. Crimes of Obdience: Toward a Social Psychology of authority and responsibility. New Haven, CT: Yale University Press.
- Marshall, T.H (1950). *Citizenship and social class and other essays* (Cambridge University Press).
- Munawwar-Rachman, B. (2011). *Reorientasi pembaharuan Islam; sekularisme, liberalisme, dan pluralisme paradigma baru Islam Indonesia*. Yayasan Abad Demokrasi. Jakarta
- Padilla, A. M., Perez, W. (2003). Acculturation, social identity, and social cognition: a new perspective. *Hispanic Journal of Behavioral Sciences*, Vol. 25, No. 1, pp. 35-55.
- Phol, F. (2007). Interreligious harmony and peace building in Indonesia Islamic Education. C.J. Montiel, N.M.Noor (eds). *Peace Psychology in Asia*. Peace Psychology Books Series.
- Stets, J. E. B., Peter, J. *Identity theory and social*

identity theory. Department of Sociology,
Washington State University, Pullman.

Taher, E. P (eds.). (2011). *Merayakan kebebasan
beragama; bunga rampai menyambut
70 tahun Djohan Efendi*. Yayasan Abad
Demokrasi. Jakarta

Tajfel. H. (1979). *Social identity and intergroup
relation*. Sydney. Cambrid University
Press.

Turner, B.S. (1989). Outline of a theory of
citizenship; *Sociology*, 24,pp, 180-217

Turner. C. John & Giles H. (1981). *Intergroup
behavior*. Oxford. UK

Keterangan:

Penelitian ini didanai dari Dana Hibah
Penelitian tahun anggaran 2015/2016
Lembaga Penelitian UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.